



Praja IPDN sebagai Aktor *Collaborative Governance* dalam Rehabilitasi Pascabanjir Aceh Tamiang

Praja IPDN as Collaborative Governance Actors in Post-Flood Rehabilitation in Aceh Tamiang

I Kadek Marssel Bagia Sedana

Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 34.0274@praja.ipdn.ac.id

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 26 Maret, 2026;

Revisi: 27 April, 2026;

Diterima: 29 Mei, 2026;

Terbit: 31 Mei, 2026

Keywords: Aceh Tamiang;
Collaborative Governance;
Humanitarian Mission; Post-Flood Recover; Praja IPDN.

Abstract: Flooding is one of the most common hydrometeorological disasters that significantly affects community life and governmental administration. Post-disaster management requires the involvement of multiple stakeholders through a collaborative approach to accelerate rehabilitation and reconstruction efforts. This study aims to analyze the humanitarian mission carried out by cadets of the Institute of Public Administration (IPDN) in post-flood management in Aceh Tamiang Regency using the Collaborative Governance framework developed by Ansell and Gash (2008). The study employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through document analysis, including activity reports, photographic documentation, official publications from the Ministry of Home Affairs, IPDN, local governments, and other supporting documents. Data analysis was conducted through coding, categorizing, and thematizing processes, which were subsequently interpreted based on the dimensions of Collaborative Governance. The findings indicate that the involvement of IPDN cadets represents an effective practice of collaborative governance. In the starting conditions dimension, collaboration was driven by the urgent need for rehabilitation and the limited resources available to the local government. The facilitative leadership dimension was reflected in the roles of the Ministry of Home Affairs, local governments, and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in facilitating coordination among stakeholders. Furthermore, institutional design was manifested through clear task allocation and coordination mechanisms, while the collaborative process was characterized by dialogue, trust, commitment, and shared understanding in supporting post-disaster recovery.

Abstrak

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Penanganan pascabencana memerlukan keterlibatan berbagai aktor melalui pendekatan kolaboratif untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan perspektif *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi yang bersumber dari laporan kegiatan, dokumentasi foto, publikasi resmi Kementerian Dalam Negeri, IPDN, pemerintah daerah, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan *coding*, *categorizing*, dan *thematizing* yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan dimensi *Collaborative Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Praja IPDN merupakan bentuk praktik *Collaborative Governance* yang berjalan efektif. Pada dimensi *starting conditions*, kolaborasi didorong oleh tingginya kebutuhan rehabilitasi serta keterbatasan sumber daya pemerintah daerah. Dimensi *facilitative leadership* terlihat melalui peran Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan BPBD dalam memfasilitasi koordinasi antaraktor. Selanjutnya, *institutional design* diwujudkan melalui pembagian tugas dan mekanisme kerja yang jelas, sedangkan *collaborative process* ditandai oleh dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama dalam mendukung pemulihan pascabencana.

Kata Kunci: Aceh Tamiang; *Collaborative Governance*; Pascabanjir; Praja IPDN; Tugas Kemanusiaan.

1. PENDAHULUAN

Bencana merupakan salah satu permasalahan publik yang semakin kompleks dalam era modern karena dampaknya tidak hanya memengaruhi aspek lingkungan, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa masyarakat global dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) menyebutkan bahwa perubahan iklim, degradasi lingkungan, urbanisasi yang tidak terkendali, serta meningkatnya kerentanan sosial telah menyebabkan berbagai negara mengalami peningkatan risiko bencana yang signifikan (Ilhami et al., 2023). Kondisi tersebut menempatkan penanggulangan bencana sebagai salah satu agenda utama pembangunan berkelanjutan karena bencana berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan, meningkatkan kemiskinan, memperlebar ketimpangan sosial, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat (UNDRR, 2023).

Dalam perspektif administrasi publik, bencana tidak lagi dipandang sebagai peristiwa alam yang bersifat insidental semata, melainkan sebagai persoalan publik yang membutuhkan tata kelola yang efektif dan kolaboratif. Kompleksitas dampak yang ditimbulkan oleh bencana membuat pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam melaksanakan proses mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, maupun rekonstruksi (Salmayati et al., 2016). Oleh karena itu, paradigma pemerintahan modern telah bergeser dari konsep *government* menuju *governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan persoalan publik (Osborne, 2010). Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai aktor dalam membangun sinergi, berbagi sumber daya, serta menciptakan mekanisme kerja sama yang efektif (I Gede Bayu Adi et al., 2025).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Secara geografis, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang menjadikan wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Selain itu, kondisi iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan tinggi menyebabkan Indonesia juga rentan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan kekeringan (Wesli, 2011). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi menjadi

jenis bencana yang paling dominan terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan persentase lebih dari 90 persen dari total kejadian bencana nasional (BNPB, 2024).

Salah satu bentuk bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan fenomena meluapnya air yang menggenangi suatu wilayah akibat meningkatnya debit air yang tidak mampu ditampung oleh sistem drainase, sungai, maupun daerah resapan. Banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap rumah penduduk dan infrastruktur publik, tetapi juga menyebabkan terganggunya aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat (Rahmah & Ikhsan, 2022). Bahkan dalam banyak kasus, banjir dapat menyebabkan lumpuhnya pelayanan pemerintahan sehingga menghambat proses penyelenggaraan urusan publik. Oleh karena itu, penanganan banjir memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan sumber daya yang berbeda-beda.

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap bencana banjir. Letak geografis yang dipengaruhi oleh sejumlah daerah aliran sungai serta tingginya intensitas curah hujan menjadikan beberapa kabupaten di Aceh rentan mengalami banjir setiap tahunnya. Salah satu daerah yang terdampak cukup serius adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten yang berada di wilayah timur Provinsi Aceh tersebut memiliki karakteristik geografis yang menyebabkan sebagian wilayahnya menjadi kawasan rawan banjir ketika terjadi peningkatan debit air pada sungai-sungai utama yang melintasi wilayah tersebut (Ade Dwinta et al., 2026). Kondisi ini semakin diperparah oleh berbagai faktor lain seperti sedimentasi sungai, perubahan tata guna lahan, dan rendahnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir.

Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Ribuan rumah penduduk terdampak genangan air, fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, pelayanan kesehatan terganggu, aktivitas ekonomi masyarakat terhenti, dan berbagai fasilitas publik tidak dapat berfungsi secara optimal (Sari, 2017). Selain itu, sejumlah kantor pemerintahan turut terdampak sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik, tetapi juga berimplikasi terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif. Akibatnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang bertujuan memulihkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan pascabencana. Rehabilitasi berfokus pada pemulihan fungsi pelayanan publik, perbaikan lingkungan, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, rekonstruksi bertujuan membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak agar mampu berfungsi secara lebih baik dan lebih tahan terhadap ancaman bencana di masa mendatang. Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antaraktor yang terlibat dalam proses pemulihan.

Besarnya dampak banjir yang terjadi di Aceh Tamiang menyebabkan pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam konteks tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah strategis dengan menugaskan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk melaksanakan misi kemanusiaan di wilayah terdampak banjir. Penugasan tersebut menjadi salah satu bentuk konkret keterlibatan lembaga pendidikan kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada situasi darurat. Praja IPDN diterjunkan langsung ke lokasi terdampak untuk membantu berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari pembersihan lingkungan, rehabilitasi fasilitas umum, pendataan masyarakat terdampak, hingga membantu aktivitas pelayanan pemerintahan di lapangan.

Keterlibatan Praja IPDN dalam penanganan pascabencana merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dalam perspektif administrasi publik. Selama ini, penelitian mengenai penanggulangan bencana umumnya lebih banyak menyoroti peran pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), organisasi kemasyarakatan, relawan, maupun aparat keamanan. Sementara itu, peran lembaga pendidikan kedinasan sebagai aktor kolaboratif dalam penanganan bencana masih relatif jarang dibahas dalam literatur akademik. Padahal, sebagai lembaga kaderisasi aparatur pemerintahan, IPDN memiliki sumber daya manusia yang besar, disiplin, serta dibekali kompetensi kepamongprajaan yang relevan untuk mendukung berbagai aktivitas kemanusiaan dan pelayanan publik.

Secara konseptual, keterlibatan Praja IPDN dalam penanganan pascabencana dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai kepamongprajaan yang menjadi karakter utama pendidikan di IPDN. Kepamongprajaan tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai pengabdian, kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan kemampuan bekerja bersama masyarakat. Melalui keterlibatan langsung dalam misi kemanusiaan, Praja memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan sekaligus memahami realitas penyelenggaraan pemerintahan di

lapangan. Di sisi lain, masyarakat memperoleh manfaat berupa tambahan sumber daya manusia yang dapat membantu percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya interaksi dan kerja sama antara berbagai aktor yang memiliki latar belakang, sumber daya, dan kewenangan yang berbeda. Dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan di Aceh Tamiang, Praja IPDN tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, BPBD, TNI, Polri, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat terdampak. Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan karakteristik *Collaborative Governance* yang menempatkan kolaborasi lintas aktor sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks.

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai suatu pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan bertujuan mengimplementasikan kebijakan atau mengelola program publik. Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan *Collaborative Governance* dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu starting conditions, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Keempat komponen tersebut saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan kolaborasi dalam menghasilkan berbagai outcome yang diharapkan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana dan penyelesaian persoalan publik yang kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Afandi et al. (2024) menemukan bahwa kolaborasi antaraktor mampu memperkuat efektivitas intervensi sosial melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Lautt dan Rahayu (2024) menjelaskan bahwa integrasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Sementara itu, Klemm et al. (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik pada tingkat komunitas. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor-aktor yang terlibat dalam membangun komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian *Collaborative Governance* masih berfokus pada hubungan antara pemerintah, masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan sektor swasta. Kajian yang secara khusus membahas keterlibatan lembaga pendidikan kedinasan dalam proses kolaborasi penanganan bencana masih sangat terbatas. Padahal, lembaga

pendidikan kedinasan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan aktor lainnya karena berfungsi sebagai institusi pembentukan calon aparatur negara yang dipersiapkan untuk menghadapi berbagai persoalan pemerintahan. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang cukup besar untuk mengkaji bagaimana peran Praja IPDN sebagai aktor kolaboratif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa analisis mengenai keterlibatan Praja IPDN sebagai aktor *Collaborative Governance* dalam penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini tidak hanya melihat peran Praja sebagai pelaksana kegiatan kemanusiaan, tetapi juga menganalisis bagaimana proses kolaborasi terbentuk, bagaimana hubungan antaraktor dibangun, serta bagaimana kontribusi Praja IPDN dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN dalam penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang melalui perspektif *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian *Collaborative Governance* dalam konteks kebencanaan serta memberikan kontribusi praktis bagi penguatan peran lembaga pendidikan kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada situasi darurat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Menurut Creswell (2018), studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara komprehensif dalam konteks kehidupan nyata melalui berbagai sumber informasi yang tersedia. Pemilihan studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik fenomena yang diteliti, yaitu keterlibatan Praja IPDN dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang merupakan peristiwa spesifik dan memiliki konteks yang unik.

Fokus penelitian diarahkan pada proses kolaborasi yang terbentuk antara Praja IPDN dengan berbagai aktor yang terlibat dalam penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Teori ini dipilih

karena mampu menjelaskan dinamika kerja sama lintas aktor dalam penyelesaian permasalahan publik yang kompleks melalui empat komponen utama, yaitu *starting conditions*, *facilitative leadership*, *institutional design*, dan *collaborative process*, yang pada akhirnya menghasilkan berbagai *outcomes* kolaboratif.

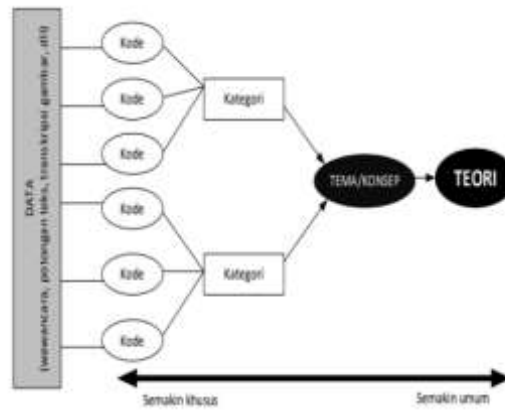
Sumber data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang. Dokumen tersebut meliputi laporan kegiatan kemanusiaan Praja IPDN, dokumentasi foto kegiatan, berita resmi dari Kementerian Dalam Negeri, publikasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), laporan pemerintah daerah, laporan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan *Collaborative Governance* dan penanggulangan bencana.

Penggunaan dokumentasi sebagai sumber utama data penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa berbagai aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Praja IPDN telah terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk laporan kegiatan, dokumentasi visual, serta pemberitaan resmi yang dapat digunakan untuk menggambarkan proses kolaborasi yang terjadi selama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain itu, dokumentasi juga memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih stabil dan dapat diverifikasi kembali dibandingkan dengan data yang hanya diperoleh melalui persepsi individu.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan berbagai tema yang muncul dari data dokumentasi yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui kegiatan reduksi data, pemberian kode (*coding*), pengelompokan kategori (*categorizing*), identifikasi tema (*thematizing*), dan interpretasi berdasarkan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008).

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, peneliti melakukan pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN di Aceh Tamiang. Kedua, data yang telah terkumpul dibaca dan dipahami secara menyeluruh untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, dilakukan proses *coding* terhadap berbagai informasi penting yang ditemukan dalam dokumen. Keempat, kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Kelima, kategori-kategori tersebut kemudian dikembangkan menjadi tema-tema utama yang merepresentasikan dimensi Collaborative

Governance. Terakhir, tema yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan kerangka teori Ansell dan Gash (2008) untuk menjelaskan proses kolaborasi dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN.



Gambar 1. Alur Analisis Data Penelitian.

Sumber: Saldana (2016)

Data dokumentasi berupa laporan kegiatan, dokumentasi foto, publikasi resmi, dan berita terkait tugas kemanusiaan Praja IPDN dianalisis melalui proses *coding*, *categorizing*, dan *thematizing*. Proses tersebut menghasilkan tema-tema utama yang kemudian diinterpretasikan menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008). Model analisis ini menunjukkan bahwa data empiris yang bersifat khusus dikembangkan secara bertahap menjadi kategori dan tema yang lebih umum hingga menghasilkan interpretasi teoritis yang menjelaskan fenomena penelitian.

Tabel 1. Fokus Analisis Berdasarkan Teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008).

Komponen Teori	Fokus Analisis
<i>Starting Conditions</i>	Kondisi awal yang mendorong kolaborasi dalam penanganan pascabanjir
<i>Facilitative Leadership</i>	Peran Kemendagri, Pemerintah Daerah, dan IPDN dalam memfasilitasi kolaborasi
<i>Institutional Design</i>	Aturan, mekanisme kerja, dan struktur kolaborasi yang terbentuk
<i>Collaborative Process</i>	Dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil antara
<i>Outcomes</i>	Dampak kolaborasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Sumber: Diadaptasi dari Ansell dan Gash (2008)

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berbeda. Triangulasi dilakukan antara laporan kegiatan, dokumentasi visual, berita resmi pemerintah, serta publikasi ilmiah yang membahas kegiatan kemanusiaan Praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam tugas kemanusiaan Praja IPDN pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

3. HASIL DAN DISKUSI

***Starting Conditions* dalam Pelaksanaan Tugas Kemanusiaan Praja IPDN Pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang**

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* sangat dipengaruhi oleh *starting conditions* atau kondisi awal yang melatarbelakangi terbentuknya kolaborasi. Kondisi awal tersebut mencakup ketimpangan sumber daya antaraktor, sejarah hubungan kerja sama, tingkat kepercayaan awal (*initial trust*), serta insentif yang mendorong para pihak untuk terlibat dalam kolaborasi. Menurut Ansell dan Gash (2008), semakin kompleks permasalahan yang dihadapi dan semakin tinggi ketergantungan antaraktor dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka semakin besar kebutuhan untuk membangun kolaborasi. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi awal menjadi penting untuk memahami mengapa berbagai aktor akhirnya terlibat dalam penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kondisi awal yang melatarbelakangi keterlibatan Praja IPDN dalam penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang tidak dapat dilepaskan dari besarnya dampak bencana yang terjadi. Banjir yang melanda wilayah tersebut menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain mengakibatkan kerusakan pada rumah penduduk, banjir juga berdampak terhadap fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, sarana transportasi, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Dampak yang luas tersebut menyebabkan kebutuhan penanganan pascabencana menjadi semakin kompleks karena tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Dalam perspektif tata kelola kebencanaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan yang cukup besar dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi secara mandiri. Luasnya wilayah terdampak, tingginya kebutuhan tenaga kerja, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah menjadi faktor yang menyebabkan proses pemulihan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Situasi ini sesuai dengan pendapat Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menyatakan bahwa kolaborasi umumnya muncul ketika suatu organisasi tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan publik secara mandiri. Dengan kata lain, keterbatasan kapasitas

menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terbentuknya kolaborasi.

Berdasarkan dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan rehabilitasi pascabanjir, pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan dalam mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak. Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek anggaran, tetapi juga ketersediaan sumber daya manusia yang mampu terlibat secara langsung dalam kegiatan rehabilitasi lapangan. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat terhadap percepatan pemulihan kondisi lingkungan dan pelayanan publik semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang mampu memberikan solusi secara cepat agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal. Kondisi tersebut menciptakan tekanan yang cukup besar terhadap pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mempercepat proses rehabilitasi.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menjadi faktor penting yang memengaruhi terbentuknya kolaborasi. Sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa proses pemulihan pascabencana dapat berjalan secara efektif. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melibatkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterlibatan IPDN menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya kelembagaan yang dimiliki pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat.

Penugasan Praja IPDN pada dasarnya merupakan bentuk mobilisasi sumber daya manusia pemerintahan yang memiliki karakteristik khusus. Berbeda dengan relawan pada umumnya, Praja IPDN merupakan peserta didik pendidikan kedinasan yang memperoleh pembinaan dalam bidang kepamongprajaan, kepemimpinan, administrasi pemerintahan, serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Praja IPDN memiliki nilai strategis karena selain memiliki jumlah personel yang relatif besar, mereka juga memiliki kedisiplinan dan kemampuan adaptasi yang cukup baik dalam menghadapi berbagai kondisi lapangan. Karakteristik tersebut menjadikan Praja IPDN sebagai sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif *resource asymmetry* yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008), kondisi awal kolaborasi di Aceh Tamiang menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya antaraktor yang justru menjadi dasar terbentuknya kerja sama. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap kondisi wilayah, namun menghadapi keterbatasan tenaga pelaksana. Sebaliknya, IPDN memiliki sumber daya manusia yang cukup besar dan siap diterjunkan ke lapangan, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, pemerintah pusat memiliki kapasitas koordinasi dan legitimasi yang memungkinkan mobilisasi berbagai sumber daya lintas sektor. Ketiga kondisi tersebut menciptakan hubungan saling ketergantungan (*interdependence*) yang kemudian menjadi fondasi terbentuknya kolaborasi.

Tabel 2. Kondisi Awal Kolaborasi dalam Penanganan Pascabanjir Aceh Tamiang.

Aspek	Kondisi
Tingkat kerusakan pascabanjir	Tinggi
Kebutuhan rehabilitasi	Sangat tinggi
Kapasitas sumber daya pemerintah daerah	Terbatas
Dukungan pemerintah pusat	Tinggi
Ketersediaan sumber daya Praja IPDN	Tinggi
Tingkat ketergantungan antaraktor	Tinggi
Urgensi pemulihan pelayanan publik	Sangat tinggi

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026



Gambar 2. Kondisi Awal Aceh Tamiang Pasca Banjir.

Sumber: Dokumentasi di Aceh Tamiang, 2026

Selain dipengaruhi oleh ketimpangan sumber daya, terbentuknya kolaborasi juga didorong oleh adanya insentif untuk berpartisipasi (*incentives for participation*). Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa setiap aktor akan terlibat dalam kolaborasi apabila terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari keterlibatan tersebut. Dalam kasus Aceh Tamiang, pemerintah daerah memperoleh manfaat berupa tambahan sumber daya manusia yang dapat membantu mempercepat proses rehabilitasi. Bagi Kementerian Dalam Negeri, keterlibatan Praja IPDN menjadi bagian dari upaya memastikan keberlangsungan pelayanan pemerintahan di daerah terdampak bencana. Sementara itu, bagi IPDN, penugasan kemanusiaan memberikan kesempatan kepada Praja untuk mengimplementasikan nilai-nilai keprajon secara langsung di tengah masyarakat.

Dari sudut pandang pendidikan kedinasan, keterlibatan Praja IPDN dalam kegiatan kemanusiaan juga memiliki dimensi pembelajaran yang penting. Selama proses pendidikan, Praja memperoleh berbagai materi mengenai pemerintahan, pelayanan publik, manajemen pemerintahan daerah, serta kepemimpinan. Namun demikian, kompetensi tersebut akan lebih bermakna apabila diimplementasikan secara langsung dalam situasi nyata. Oleh karena itu, penugasan kemanusiaan dapat dipahami sebagai sarana pembelajaran kontekstual yang memungkinkan Praja memahami secara langsung kompleksitas permasalahan pemerintahan yang dihadapi masyarakat.

Faktor lain yang turut memengaruhi terbentuknya kolaborasi adalah adanya kesamaan tujuan di antara para aktor. Meskipun masing-masing pihak memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda, seluruh aktor yang terlibat memiliki tujuan yang sama, yaitu mempercepat pemulihan kondisi masyarakat dan pemerintahan pascabencana. Kesamaan tujuan tersebut menjadi modal awal yang penting karena mampu meminimalkan potensi konflik kepentingan dan memperkuat orientasi kolektif dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam teori collaborative governance, kondisi ini dikenal sebagai *shared purpose* yang menjadi fondasi terbentuknya kerja sama yang efektif.

Analisis terhadap kondisi awal menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang lahir dari kombinasi berbagai faktor, yaitu tingginya tingkat kerusakan pascabencana, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, kebutuhan akan percepatan rehabilitasi, ketersediaan sumber daya manusia dari IPDN, serta adanya tujuan bersama untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak. Faktor-faktor tersebut menciptakan hubungan saling ketergantungan antaraktor yang kemudian mendorong terbentuknya mekanisme collaborative governance. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Ansell dan Gash (2008), *starting conditions* dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN dapat dikategorikan sebagai kondisi yang mendukung terbentuknya kolaborasi. Tingginya kebutuhan akan sumber daya dan adanya insentif yang jelas bagi masing-masing aktor menciptakan dasar yang kuat bagi proses kolaborasi pada tahap berikutnya. Kondisi awal tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi munculnya kepemimpinan kolaboratif (*facilitative leadership*) yang berperan dalam mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

***Facilitative Leadership* dalam Pelaksanaan Tugas Kemanusiaan Praja IPDN Pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang**

Menurut Ansell dan Gash (2008), *facilitative leadership* merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan collaborative governance. Kepemimpinan fasilitatif

tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga berperan sebagai mediator, koordinator, dan penggerak yang mampu menyatukan berbagai aktor dengan latar belakang kepentingan yang berbeda. Dalam konteks penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang, kepemimpinan fasilitatif terlihat melalui peran berbagai pihak dalam mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Kementerian Dalam Negeri menjadi aktor utama yang berperan dalam memfasilitasi keterlibatan Praja IPDN dalam tugas kemanusiaan. Melalui kewenangannya sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri mendorong mobilisasi sumber daya yang dimiliki IPDN untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Langkah tersebut menunjukkan adanya kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai sumber daya yang tersebar pada berbagai institusi pemerintahan.

Selain Kementerian Dalam Negeri, IPDN juga memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan tugas kemanusiaan berjalan secara efektif. Melalui koordinasi internal, Praja yang ditugaskan diberikan arahan mengenai tugas, tanggung jawab, serta nilai-nilai kepamongprajaan yang harus diterapkan selama berada di lokasi bencana. Kepemimpinan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga pada pembentukan karakter pengabdian dan kepedulian sosial sebagai bagian dari proses pendidikan kepamongprajaan.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berperan sebagai fasilitator lapangan yang menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah daerah memberikan informasi mengenai kebutuhan prioritas masyarakat, lokasi yang memerlukan penanganan segera, serta bentuk dukungan yang diperlukan dari Praja IPDN. Dengan adanya koordinasi tersebut, kegiatan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih efektif dan tepat sasaran.

BPBD Kabupaten Aceh Tamiang juga memainkan peran penting sebagai lembaga teknis yang memahami kondisi kebencanaan di wilayah terdampak. Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan Praja IPDN, BPBD membantu menentukan prioritas penanganan serta memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi yang dilakukan mendukung proses pemulihan pascabencana secara menyeluruh. Sinergi antara BPBD, pemerintah daerah, dan Praja IPDN menunjukkan pentingnya kepemimpinan kolaboratif dalam menghindari tumpang tindih program dan memperkuat efektivitas penanganan bencana.

Berdasarkan hasil analisis, kepemimpinan fasilitatif dalam penanganan pascabanjir di Aceh Tamiang tidak bersifat hierarkis semata, melainkan lebih menekankan pada koordinasi,

komunikasi, dan pembagian peran yang jelas antaraktor. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam *Collaborative Governance* adalah kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan, menjaga komitmen para aktor, serta memfasilitasi terciptanya tujuan bersama.

Tabel 3. Aktor dan Peran Facilitative Leadership.

Aktor	Peran dalam Kolaborasi
Kementerian Dalam Negeri	Inisiator dan koordinator kolaborasi
IPDN	Penyedia sumber daya manusia dan pelaksana tugas kemanusiaan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Fasilitator kebutuhan lapangan
BPBD	Koordinator teknis kebencanaan
Praja IPDN	Pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026



Gambar 3. *Facilitative Leadership* dalam Pelaksanaan Tugas Kemanusiaan.

Sumber: Dokumentasi di Aceh Tamiang, 2026

Dengan demikian, *facilitative leadership* dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN berhasil menjadi penghubung antaraktor sehingga kolaborasi dapat berjalan secara terarah dan efektif. Kepemimpinan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi terbentuknya desain kelembagaan (*institutional design*) yang mengatur mekanisme kerja sama antaraktor dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

***Institutional Design* dalam Pelaksanaan Tugas Kemanusiaan Praja IPDN Pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang**

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *institutional design* merupakan seperangkat aturan, prosedur, dan mekanisme yang mengatur hubungan antaraktor dalam suatu proses kolaborasi. Kejelasan aturan dan pembagian peran menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap aktor memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN di Aceh Tamiang, desain kelembagaan terlihat melalui adanya pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, dan Praja IPDN. Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai

pengarah kebijakan, pemerintah daerah sebagai koordinator kebutuhan lapangan, sedangkan Praja IPDN bertindak sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembagian peran tersebut memungkinkan kegiatan berjalan secara lebih terorganisir dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan.

Pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh mekanisme koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan Praja IPDN disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan arahan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak berjalan secara spontan, tetapi didasarkan pada mekanisme kerja yang terstruktur. Keberadaan struktur koordinasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas kolaborasi selama proses pemulihan pascabencana berlangsung.

Selain itu, desain kelembagaan yang terbentuk mencerminkan adanya prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab bersama. Setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi sehingga tujuan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dicapai secara lebih optimal. Dalam perspektif collaborative governance, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas hubungan antaraktor, tetapi juga oleh keberadaan aturan dan mekanisme yang mampu mengarahkan interaksi tersebut secara efektif.

Tabel 4. Pembagian Peran dalam Kolaborasi Pascabanjir Aceh Tamiang.

Aktor	Tugas Utama
Kemendagri	Pengarah dan fasilitator kebijakan
Pemerintah Daerah	Koordinasi kebutuhan lapangan
BPBD	Dukungan teknis kebencanaan
Praja IPDN	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
Masyarakat	Partisipasi dalam pemulihan lingkungan

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026



Gambar 4. Pembagian Peran dalam Pelaksanaan Tugas Kemanusiaan.

Sumber: Dokumentasi di Aceh Tamiang, 2026

Keberadaan desain kelembagaan yang jelas menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan proses kolaboratif. Selanjutnya, efektivitas kolaborasi tersebut dapat dianalisis lebih lanjut

melalui dimensi *collaborative process*, yang mencakup dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan hasil antara yang dicapai selama pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang.

Collaborative Process dalam Pelaksanaan Tugas Kemanusiaan Praja IPDN Pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang

Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative process* merupakan inti dari *Collaborative Governance* karena pada tahap inilah interaksi antaraktor berlangsung secara langsung. Proses kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor dan aturan yang jelas, tetapi juga oleh kualitas hubungan yang dibangun selama pelaksanaan kegiatan. Ansell dan Gash mengidentifikasi beberapa elemen utama dalam *collaborative process*, yaitu *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Kelima elemen tersebut dapat ditemukan dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dialog langsung merupakan tahapan awal yang memungkinkan para aktor membangun komunikasi dan menyamakan persepsi mengenai tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan di Aceh Tamiang, komunikasi dilakukan melalui berbagai bentuk koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, Praja IPDN, perangkat desa, dan masyarakat terdampak. Dialog tersebut menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas serta menentukan langkah-langkah rehabilitasi yang harus segera dilaksanakan. Melalui komunikasi yang intensif, Praja IPDN memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi masyarakat terdampak dan kebutuhan yang harus diprioritaskan. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh informasi mengenai berbagai kegiatan yang akan dilakukan selama proses rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dialog tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kesepahaman antaraktor yang terlibat dalam kolaborasi.

Kepercayaan merupakan unsur penting dalam *Collaborative Governance* karena menjadi dasar bagi keberlangsungan hubungan kerja sama antaraktor. Dalam konteks penanganan pascabanjir Aceh Tamiang, kepercayaan dibangun melalui keterlibatan langsung Praja IPDN dalam berbagai aktivitas kemanusiaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kehadiran Praja di lokasi terdampak memberikan gambaran nyata bahwa pemerintah hadir untuk membantu masyarakat dalam menghadapi dampak bencana.

Pelaksanaan *Collaborative Governance* memerlukan adanya pemahaman bersama mengenai tujuan yang ingin dicapai. Dalam kasus Aceh Tamiang, seluruh aktor memiliki kesamaan tujuan, yaitu mempercepat pemulihan kondisi masyarakat pascabanjir. Kesamaan

tujuan tersebut menjadi faktor yang memperkuat kerja sama karena setiap aktor memahami peran dan kontribusinya masing-masing dalam mencapai tujuan kolektif. Meskipun berasal dari institusi yang berbeda, seluruh pihak memiliki orientasi yang sama terhadap keberhasilan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kesamaan pemahaman ini mampu meminimalkan potensi konflik kepentingan serta memperkuat koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Tabel 5. Temuan Collaborative Process dalam Tugas Kemanusiaan Praja IPDN.

Dimensi	Temuan
<i>Face-to-Face Dialogue</i>	Koordinasi aktif antara Praja, Pemda, BPBD, dan masyarakat
<i>Trust Building</i>	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
<i>Commitment to Process</i>	Keterlibatan aktif seluruh aktor selama rehabilitasi
<i>Shared Understanding</i>	Kesamaan tujuan percepatan pemulihan pascabencana
<i>Intermediate Outcomes</i>	Percepatan rehabilitasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *collaborative process* dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja IPDN berjalan secara efektif. Kelima elemen yang dikemukakan Ansell dan Gash dapat ditemukan dalam proses kolaborasi yang berlangsung di Aceh Tamiang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Praja IPDN tidak hanya memberikan tambahan sumber daya manusia bagi pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kualitas kolaborasi dalam penanganan pascabencana.

***Outcomes Collaborative Governance* dalam Tugas Kemanusiaan Praja IPDN**

Keberhasilan *Collaborative Governance* pada akhirnya dapat dilihat dari outcome atau hasil yang dicapai melalui proses kolaborasi. Dalam konteks penanganan pascabanjir Aceh Tamiang, outcome yang muncul tidak hanya dirasakan oleh masyarakat terdampak, tetapi juga oleh pemerintah daerah dan Praja IPDN sebagai pelaksana kegiatan kemanusiaan.

Bagi masyarakat, keterlibatan Praja IPDN memberikan kontribusi terhadap percepatan pemulihan kondisi lingkungan dan fasilitas umum yang terdampak banjir. Berbagai kegiatan rehabilitasi yang dilakukan membantu masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara lebih cepat. Selain itu, kehadiran Praja juga memberikan dukungan moral yang memperkuat semangat masyarakat dalam menghadapi proses pemulihan pascabencana.

Bagi pemerintah daerah, kolaborasi dengan Praja IPDN membantu mengurangi beban kerja yang muncul akibat tingginya kebutuhan rehabilitasi pascabencana. Tambahan sumber daya manusia yang dimiliki IPDN memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pemulihan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat. Sementara itu, bagi Praja IPDN, keterlibatan dalam tugas kemanusiaan memberikan pengalaman empiris yang sangat berharga dalam memahami dinamika penyelenggaraan

pemerintahan di lapangan. Pengalaman tersebut memperkuat kompetensi kepemimpinan, kemampuan koordinasi, komunikasi sosial, serta pemahaman mengenai pentingnya pelayanan publik dalam situasi krisis. Dengan kata lain, tugas kemanusiaan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap proses pembentukan karakter dan kompetensi Praja sebagai calon aparatur pemerintahan.

Tabel 6. Outcomes *Collaborative Governance* Pascabanjir Aceh Tamiang.

Aktor	Outcome
Masyarakat	Pemulihan lingkungan dan fasilitas umum lebih cepat
Pemerintah Daerah	Berkurangnya beban rehabilitasi pascabencana
Praja IPDN	Peningkatan kompetensi kepamongprajaan dan kepemimpinan
Kolaborasi Antaraktor	Terbangunnya sinergi dan jejaring kerja sama

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Praja IPDN dalam penanganan pascabanjir Aceh Tamiang merupakan praktik *Collaborative Governance* yang berjalan cukup efektif. Keberhasilan tersebut terlihat dari adanya kondisi awal yang mendukung kolaborasi, kepemimpinan yang memfasilitasi kerja sama, desain kelembagaan yang jelas, proses kolaborasi yang berjalan baik, serta outcome yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, Praja IPDN dapat dipandang sebagai salah satu aktor strategis dalam mendukung tata kelola kebencanaan berbasis kolaborasi di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan, pelaksanaan tugas kemanusiaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan praktik *Collaborative Governance* yang berjalan secara efektif. Analisis menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) menunjukkan bahwa kolaborasi terbentuk karena adanya *starting conditions* yang ditandai oleh tingginya dampak bencana, keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, serta kebutuhan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kondisi tersebut mendorong keterlibatan berbagai aktor, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, BPBD, dan Praja IPDN. Selain itu, keberhasilan kolaborasi didukung oleh *facilitative leadership* yang mampu mengoordinasikan berbagai pihak, *institutional design* yang memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab, serta *collaborative process* yang ditandai oleh dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman yang sama mengenai tujuan pemulihan pascabencana.

Kegiatan ini menemukan bahwa keterlibatan Praja IPDN tidak hanya memberikan dukungan sumber daya manusia bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi juga memperkuat kapasitas kolaboratif dalam tata kelola kebencanaan. Kehadiran Praja IPDN

berkontribusi terhadap percepatan pemulihan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Di sisi lain, tugas kemanusiaan juga menjadi sarana pembelajaran empiris yang memperkuat kompetensi kepomongprajaan, kepemimpinan, dan pengabdian masyarakat bagi Praja IPDN. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Praja IPDN dapat diposisikan sebagai aktor strategis dalam *Collaborative Governance* kebencanaan, sekaligus memperluas kajian Ansell dan Gash melalui keterlibatan lembaga pendidikan kedinasan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memberikan dukungan dan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Praja IPDN yang terlibat dalam tugas kemanusiaan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang atas dedikasi dan pengabdianannya dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Akhirnya, penulis mengucapkan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Dwinta, Hilma Erliana, Luthfi, Intan Wulan Sari, & Lilis Marlina. (2026). Penanganan bencana hidrometeorologi melalui bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner*, 3(1).
- Afandi, A., Wibowo, A., & Setiawan, D. (2024). Self-organizing volunteers as a grassroots social innovation in disaster management. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 45–60.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Data informasi bencana Indonesia (DIBI)*. <https://dibi.bnppb.go.id>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Ilhami, T., Akbar, S., Sayuti, M., Ikhsan, M., & Savira Ersa, N. (2023). Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan banjir di Desa Ceubrek Pirak, Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Vokasi*, 7*(1). <https://doi.org/10.30811/vokasi.v7i1.3289>

- Klemm, R. D., Harris, J., Rawat, R., & Wilcox, M. (2022). Translating multisectoral nutrition policy into community practice: Lessons for collaborative governance. *Food Policy*, 109, 102266. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102266>
- Lautt, B., & Rahayu, A. Y. S. (2024). Integration of regional policies and *Collaborative Governance* in public service delivery. *Policy and Governance Review*, 8(1), 78–94.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203861684>
- Rahmah, S., & Ikhsan, I. (2022). Manajemen bencana dalam penanganan pascabencana BPBD Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1). <https://doi.org/10.24076/jspg.2022v4i1.776>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.
- Salmayati, Hermansyah, & Agussabti. (2016). Kajian penanganan gizi balita pada kondisi kedaruratan bencana banjir di Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 16(3).
- Sari, Z. (2017). Evaluasi efektivitas implementasi program penanggulangan bencana banjir Kabupaten Aceh Barat. *Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia*, 6, C001–C004. <https://doi.org/10.32315/ti.6.c001>
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2023). *Global assessment report on disaster risk reduction 2023*. <https://www.undrr.org>
- Wesli. (2011). Kajian spasial dan partisipasi masyarakat sebagai upaya pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utara. *Teras Jurnal*, 1(1).
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.